

Pendidikan Dinamika Demokrasi dalam Peristiwa Suksesi di Saqifah Bani Saidah dan Peralihan Kepemimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin

Hafizh Syah Reza Pahlevi¹, Nasihun Amin²

¹UIN Walisongo Semarang | hafizh_syah_reza_pahlevi_1904028003@student.walisongo.ac.id

² UIN Walisongo Semarang | nasihun_amin@walisongo.ac.id

Abstrak

Awal mula konflik internal umat Islam dalam urusan politik dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dimana umat menghadapi perselisihan ketika hendak menentukan pemimpin umat Islam sebagai suksesi kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW. Kaum Ansar dan Muhajirin merasa pantas dan berhak menjadi penerus Nabi Muhammad, mereka berkumpul di Saqifah Bani Saidah untuk membahas masalah tersebut. Saqifah Bani Saidah adalah balai pertemuan di Madinah yang digunakan untuk membahas suatu masalah umum. Kaum Ansar, Abu Bakar, dan Umar berkumpul untuk menyelesaikan persoalan pemimpin berikutnya, karena terjadi perselisihan tentang siapa yang lebih cocok menjadi pemimpin menggantikan Nabi Muhammad. Peristiwa di Saqifah menjadi peristiwa yang menandai lahirnya rasyidun dengan kedudukan Abu Bakar sebagai khalifah pertama bagi umat Islam yang dipilih secara demokratis berdasarkan kesepakatan mayoritas rakyat di tempat itu. kisah suksesi kepemimpinan pasca wafatnya Nabi Muhammad ini akan lebih baik apabila dipahami bukan sebagai sebuah konflik semata, akan tetapi juga sebagai sebuah pendidikan dalam dinamika berdemokrasi. Kesimpulan dari peristiwa di Saqifah Bani Saidah yang tercantum dalam makalah ini adalah; (1) Acara di Saqifah menjadi forum diskusi politik demokrasi modern, dengan kesepakatan mayoritas masyarakat setempat untuk memilih Abu Bakar. (2) Model pemerintahan pada era Khulafa'ar – Rasyidin cenderung model republik. (3) Peristiwa di Saqifah Bani Saidah menghasilkan revolusi politik terhadap perkembangan politik dan sistem ketatanegaraan umat Islam. Kata kunci: Saqifah Bani Saidah, pemimpin, demokrasi, politik.

Kata Kunci: Pendidikan, Pemimpin, Demokrasi, Politik

Abstract

The beginning of the internal conflict of Muslims in political matters began after the death of the Prophet Muhammad, where the people faced conflict when they wanted to determine the leaders of the Muslims as a succession of leadership from the Prophet Muhammad. The Ansar and Muhajirin felt appropriate and entitled to be the successors of the Prophet Muhammad, they gathered at Saqifah Bani Saidah to discuss the problem. Saqifah Bani saidah was a meeting hall in Medina that was used to deliberate on a general problem. The Ansar, Abu Bakar, and Umar gathered to settle the question of the next leader, because there was a dispute about who would be more suitable to be the leader to replace the Prophet Muhammad. The incident at Saqifah became the event that marked the birth of the rashidun with the position of Abu Bakr being the first caliph for Muslims who were democratically chosen based on the agreement of the majority of the people in that place. The story of the succession of leadership after the death of the Prophet Muhammad would be better if understood not only as a conflict, but also as an education in democratic dynamics. The conclusions of the events at Saqifah Bani Saidah listed in this paper are; (1) The event at Saqifah became a forum for modern democratic political discussion, with the agreement of the majority of local people to vote for Abu Bakar. (2) The model of government in the Khulafa'ar - Rashidin era tended to be a republican model. (3) The events at Saqifah Bani Saidah produced a political revolution towards the development of politics and the state administration system in the Islamic ummah.

Keywords: *Education, leader, democracy, politic*

PENDAHULUAN

Siang itu sekitar waktu dzuhur pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 H, umat Islam dilanda kesedihan yang amat luar biasa. Nabi Muhammad SAW, yang merupakan Rasul akhir zaman wafat. Beliau menarik nafas terakhir di pangkuan Aisyah, istri beliau, tanpa memberi wasiat apa-apa. Menurut Ummu Salamah, Nabi wafat sementara bersandar ke dada Ali bin Abi Thalib sepupu dan menantu beliau. Ali pun mengatakan demikian, begitu pula dengan ‘Umar

bin Khattab. Nabi telah memberi wasiat, sekurang-kurangnya dalam hal orang yang akan memandikan jenazah dan hutang-hutang beliau, yang kemudian dipenuhi oleh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya, dalam sebuah petak kamar tempat tinggal Aisyah di sisi sebelah timur masjid Nabi, berakhirilah hidup sang Rasul dalam usia 63 tahun, 53 tahun di Mekah, dan 10 tahun di Madinah. (Hashem, 1994).

Hari tersebut menjadi hari yang amat kelabu. Keluarga dan para sahabat merasa sangat terpuak. Di

saat yang bersamaan, kaum Ansar yang mengunggulkan Sa'ad bin Ubadah berkumpul di Saqifah Bani Saidah guna mengangkatnya sebagai pengganti kepemimpinan umat setelah Nabi. Ali bin Abi Thalib bersama Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah, mengisolasi diri di rumah Fathimah, sedangkan kaum Muhajirin yang umumnya mengunggulkan Abu Bakar, 'Umar bin Khaththab, dan Usaid bin Hudhair berada di Bani Abdul Asyhal. Tiba-tiba seseorang datang kepada Abu Bakar dan 'Umar bin Khaththab lalu berkata: "Sesungguhnya kaum Anshar lebih memilih Sa'ad bin Ubadah di Saqifah (hall) Bani Saidah. Jika kalian berdua ada keperluan, segeralah pergi ke tempat mereka, sebelum perkara ini tak bisa dibendung." Padahal saat itu, jenazah Rasulullah SAW belum diurus dan pintu rumah beliau ditutup oleh keluarga beliau. 'Umar bin Khaththab berkata kepada Abu Bakar: "Marilah kita pergi kepada saudara-saudara kita dari kaum Anshar sebelum hal-hal yang tak diinginkan terjadi." (Ibnu Hisyam, 2000)

Inilah awal terjadinya konflik internal umat Islam dalam hal politik, dimana umat menghadapi masalah suksesi kepemimpinan setelah Nabi wafat. Di tangan siapakah pimpinan umat Islam setelah ini? Siapakah yang layak menjadi pengganti Nabi untuk memimpin umat? Sebab Nabi tidak pernah menunjuk secara resmi siapa yang menjadi penggantinya kelak. Persoalan inilah yang kemudian menimbulkan konflik antara kelompok Anshar dan Muhajirin. Masing-masing merasa berhak dan telah memiliki calon. Kelompok Anshar adalah penduduk asli Madinah, mereka terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Anshar berarti penolong, sebutan ini diberikan karena merekalah kaum muslim yang menolong muslim penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, yang disebut kelompok Muhajirin (yakni orang-orang yang berhijrah). Maka wajar jika kemudian kaum Anshar akan cepat-cepat berpikir mengenai kota mereka sesudah Rasulullah wafat. Beberapa orang dari kalangan Anshar membicarakan masalah ini lalu berkumpul di Saqifah Bani Saidah. (Hashem, 2004)

Munculnya khilafah yang berarti penggantian atau suksesi kepemimpinan, dimaksudkan sebagai penggantian kepemimpinan selepas Rasulullah SAW wafat, bukan dalam kedudukannya sebagai Nabi, namun sebagai pemimpin umat. Orang yang memegang jabatan khilafah disebut khalifah. (Moch. Fahrurrozi, 2004) Tidak adanya pesan khusus Rasulullah tentang calon pengganti kepemimpinan negara mendorong kaum Anshar dan Muhajirin untuk secepatnya mencari penggantinya. Pertemuan kaum Anshar di Saqifah Bani Saidah mengunggulkan Sa'ad bin Ubadah sebagai pemuka suku Khajraj yang sekiranya pantas menduduki kursi kepemimpinan. Sedangkan kaum Muhajirin mengunggulkan Abu Bakar Ash-Shiddiq. (Zakki Fuad, 2011)

Berangkat dari peristiwa ini, penulis tertarik untuk meneliti apa sebenarnya Saqifah Bani Saidah dan peristiwa yang terjadi di sana? Bagaimana kronologi dan hasil dari peristiwa disana? Serta bagaimana Implikasi dan relevansi yang dapat dirasakan dari peristiwa tersebut? Sebab menurut hemat penulis,

peristiwa ini tidak hanya dapat dipahami sebagai konflik politik semata namun juga dapat dijadikan bahan ajar dalam memberikan pendidikan mengenai dinamika dalam berdemokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dimana penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai literatur seperti buku, catatan, penelitian terdahulu yang relevan, serta referensi lainnya, sebagai landasan teori dan analisa untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti. (M. Iqbal Hasan, 2002) Adapun sumber data antara lain sumber primer, yaitu literatur yang membahas terkait peristiwa Saqifah Bani Saidah. Kemudian sumber sekunder berupa literatur-literatur lain yang dapat mendukung penelitian ini.

PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Definisi Politik, Demokrasi, Dan Suksesi Kepemimpinan

Sebelum lebih jauh membahas mengenai bagaimana peristiwa yang terjadi di Saqifah Bani Saidah beserta berbagai dinamika yang ada dan implikasinya, penulis mencoba memaparkan dahulu apa itu definisi politik, demokrasi, dan suksesi dalam Islam sebagai dasar dalam memahami makalah ini.

a. Politik

Kata “politik”, berasal dari bahasa Yunani “*politikos*” atau bahasa Latin “*politica*” yang pemakaian kata itu pertama kali dalam abad ke 5 SM. Jika ditinjau asal katanya, berasal dari kata “*polis*”, berarti “negara kota”. Dalam bahasa Arab, politik diartikan sebagai “*siyashah*”, yang mengandung isi “kenegaraan” sebagai halnya kata politik (yang berasal dari bahasa Yunani, *politikos*). Sebelumnya, *siyashah* berarti muslihat dan segala macam usaha serta ikhtiar untuk mencapai sesuatu atau menyelesaikan suatu perkara. (Abidin Zainal Ahmad, 1977) Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), “politik” diartikan dengan (1) (pengetahuan) yang berkenaan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem

pemerintahan dan dasar pemerintahan); (2) Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dsb.) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain; (3). Cara bertindak (dalam menghadapi dan menangani suatu masalah).

Dengan demikian, secara umum politik dapat diartikan sebagai kebijakan yang digunakan dan dipakai dalam setiap urusan dan tindakan. Dalam kosa kata bahasa Indonesia terdapat kata ‘*siasat*’, yang berasal dari kata bahasa Arab *siyashah*, karena itu kata *politik/siasat* sangat luas jangkauannya. Maka muncul pula ilmu fiqih yang membahas politik atau biasa disebut *fiqh siyashah*.

Abdul Mu’in Salim (2002) mengemukakan beberapa cita-cita politik seperti yang dijanjikan Allah kepada orang-orang *beriman* dan beramal saleh dalam al-Qur’an, adalah (1) terwujudnya sebuah sistem politik, (2) berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap, dan (3) terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

b. Demokrasi

Secara etimologis "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari

bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Ada banyak definisi tentang demokrasi, namun menurut Rahman Yasin, yang paling populer untuk saat ini adalah apa yang telah dirumuskan oleh Abraham Lincoln, presiden Amerika Serikat yang ke-16. Menurut Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Intinya, demokrasi adalah suatu tata pemerintahan dimana rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung berkuasa dan berdaulat penuh. (Rahman Yasin, 2006)

Aristoteles menyebut demokrasi sebagai ‘politeia atau republik’. (Diane Revitch, 1997) Politeia dipandang sebagai bentuk negara paling baik dalam politik. Adapun yang dimaksud dengan politeia adalah ‘demokrasi moderat’, yaitu demokrasi dengan undang-undang dasar atau demokrasi konstitusional. Tiga sumbangan Aristoteles yang tertanam di jantung demokrasi adalah “kebebasan pribadi, pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar

(konstitusi), dan pentingnya kelas menengah yang besar sebagai pemegang tampuk kekuasaan”. Bisa dipahami bahwa pemerintah oleh rakyat yang dimaksud adalah pemerintah oleh rakyat melalui mekanisme perwakilan (demokrasi delegatif) sebab tidak mungkin semua orang menjadi pemerintah dalam waktu bersamaan. Kemungkinan, ia hanya bisa menduduki satu posisi tertentu dalam waktu yang tertentu (terbatas) pula. Sebab, bila semua orang berhak untuk menjadi pemerintah maka diperlukan adanya pembatasan masa jabatan sehingga memungkinkan bagi setiap orang menjadi pemerintah. Aristoteles memandang bahwa orang yang berasal dari kelas menengahlah yang paling tepat untuk menduduki posisi penting dalam pemerintah. Sebab, menurutnya orang-orang dari kelas menengah mempunyai kecakapan lebih dibanding kelas-kelas lain. (Diane Revitch, 1997)

Apabila politik sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya memiliki jangkauan yang luas, maka dari beberapa pengertian di atas, demokrasi ini menjadi lebih

terkhusus lagi pemaknaannya yaitu bertitik pada sebuah 'sistem' bagaimana pemerintahan itu dijalankan. Atau secara sederhana, penulis menyebut demokrasi ini adalah sebuah sistem pemerintahan.

c. Suksesi Kepemimpinan

Istilah suksesi diambil dari kata Bahasa Inggris *succession* atau Bahasa latin *succeio*, yang berarti penggantian, urutan, pewarisan. (Andi Hamzah, 1986) Dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang mengenal peradaban, mereka akan membentuk suatu komunitas yang di dalamnya terdapat pemimpin. Ketika pemimpin terdahulu sudah selesai masa jabatannya ataupun wafat, maka akan terjadi proses alih kepemimpinan yang disebut dengan suksesi kepemimpinan. (Ragil Sapto Wibowo, 2011)

Titik kritis dalam suksesi kepemimpinan ini di antaranya adalah bagaimana mendapatkan seorang calon pemimpin yang sadar akan posisinya sebagai pemimpin yang memiliki makna bahwa 'pemimpin itu pelayan'. Persepsi sebuah suksesi selalu ditanggapi dengan sebuah kontroversi. Hal ini

sangat wajar sebagai dinamika kehidupan yang selalu ada dua sisi bertolak belakang. Ada yang menanggapi dengan dukungan, dan ada pula yang menolaknya. Suksesi akan menjadi hal yang mutlak terjadi baik itu di dalam organisasi maupun negara. (Ragil Sapto Wibowo, 2011)

Ada beberapa pola dalam suksesi kepemimpinan, antara lain; *Pertama*, dinastik, yaitu suksesi kepala negara yang dilakukan dengan cara penunjukan atau pewarisan dari kepala negara yang mendahuluinya. (Munawir Syadzali, 1999) *Kedua*, pemilihan umum, yaitu pengangkatan kepala negara berdasarkan pemilihan. Semua warga negara yang memiliki hak pilih, akan memilih calon kepala negara secara langsung, atau secara tidak langsung melalui dewan perwakilan. (Rumidah Rabi'ah, 2009) *Ketiga*, kudeta, dalam memahami hal ini, ada dua posisi yang nampak. Satu sisi, orang yang 'terdepak' dari kekuasaannya sudah tidak memiliki pendukung, ditinggalkan kekuatan, dan tidak berkuasa melawan. Sisi lain, orang yang mengambil alih kekuasaan, yang biasanya didukung kekuatan,

loyalitas, dan keberuntungan. (Arwan Tuti Artha, 2007) *Keempat, people power*, adalah suksesi yang dilakukan dengan penggunaan kekuatan keamanan (fisik) untuk menegakkan kekuasaan politik. Suksesi semacam ini bisa berbentuk revolusi (menggunakan kekuatan seluruh rakyat), *coup d'etat* (perebutan kekuasaan menggunakan kekuatan pemerintah lama untuk menggulingkan dan menggantikannya) atau *pronunciamiento* (semacam *coup d'etat*, tetapi menggunakan kekuatan militer). (Peter Calvert, 1993)

2. Saqifah Bani Saidah dan Kronologi Suksesi Kepemimpinan Pasca Nabi Muhammad Wafat

Saqifah Bani Saidah adalah balai pertemuan di Madinah, seperti *Dar al-Nadwah* di Mekah, balai pertemuan orang Quraisy. Sudah kebiasaan kaum Anshar berkumpul di balai itu untuk memusyawarahkan masalah-masalah umum, sebagaimana kebiasaan kaum Quraisy berkumpul di *Dar al-Nadwah*. Saqifah ini terletak di suatu

tempat sekitar lima ratus meter sebelah Barat Masjid Nabi. Di sini terdapat sebuah sumber air yang bernama Bi'r Budha'ah dan sebuah masjid. Marga Saidah yang mendiami 'desa' ini memiliki sebuah balai (*Saqifah*) tempat bermusyawarah, yang terkenal dengan nama Saqifah Bani Saidah. Di sinilah kaum Anshar berkumpul pada saat Rasul wafat, untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah, pemimpin kaum Anshar, menjadi pemimpin umat. (Hashem, 2004)

Rasulullah SAW. wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabi'ul Awwal 11 H, dalam usia 63 tahun lebih 4 hari. (Safiyurrahman, 2008) Setelah Rasulullah SAW. wafat, sedangkan jenazah beliau belum diurus dan pintu rumah beliau ditutup oleh keluarga beliau, kaum Anshar berkumpul di Saqifah Bani Saidah untuk memilih khalifah dari kalangan mereka. Berita pertemuan tersebut sampai pada Abu Bakar dan 'Umar. Kemudian segera keduanya menuju Saqifah. Informasi tersebut diduga dari seorang suku Aus yang kurang setuju bila Sa'ad bin Ubadah terpilih dalam pertemuan itu. Bila dia terpilih maka kebijakan negara lebih banyak

menguntungkan suku Khajrat dari pada suku Aus. (M. Hussin Haikal' 1979)

Sesampainya disana, 'Umar dan Abu Bakar menemukan seseorang yang berselimut di antara kaum Anshar. Beliau bertanya, "Siapakah orang ini?" Kaum Anshar menjawab, "Dia Sa'ad bin Ubadah." 'Umar bertanya kembali, "Kenapa ia mengenakan selimut?" Kaum Anshar menjawab, "Karena ia sedang sakit." Kemudian tatkala 'Umar dan Abu Bakar duduk, salah seorang dari pembicara kaum Anshar berdiri setelah memuji Allah dia berkata, "*'Ammaba'du*, kami adalah kaum Anshar para penolong Allah dan pionir-pionir Islam, dan kalian wahai kaum Muhajirin adalah dari kalangan Nabi kami, dan sesungguhnya telah muncul tanda-tanda dari kalian bahwa kalian akan turut mendominasi kami di sini, di tempat tinggal kami ini dan akan mengambil alih kekuasaan dari kami." (Ibnu Katsir, 2004)

Setelah orang tersebut diam, sebenarnya 'Umar hendak berbiara, ia telah menyiapkan redaksi yang ia anggap menakjubkan. Namun ia

mencoba menyembunyikan sikap kerasnya karena menghormati Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Tahanlah dirimu, wahai 'Umar." Setelah itu, Abu Bakar berbicara dan ia jauh lebih mengerti dan lebih tenang daripada 'Umar. Abu Bakar mengucapkan semua perkataan indah yang telah lebih baik dari yang 'Umar siapkan. Abu Bakar diam sejenak lalu berkata lagi: "Adapun kebaikan memang berada pada kalian sebagaimana yang kalian katakan, dan kalian memang berhak memilikinya. Tapi, orang-orang Arab hanya tahu bahwa perkara (memilih pengganti Nabi) ini adalah hak orang-orang Quraisy, karena mereka orang-orang Arab yang paling baik nasab dan negerinya. Sungguh aku menerima dengan hati terbuka dan lapang dada untuk menjadi pemimpin kalian salah seorang dari dua orang ini ('Umar dan Abu Ubaidah). Maka baiatlah di antara keduanya yang mana yang kalian sukai." Abu Bakar memegang tangan 'Umar dan tangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. (Ibnu Hisyam, 2000)

Seorang laki-laki dari kaum Anshar berkata: "Akulah orang yang

diambil pendapatnya oleh kaum Anshar, tempat pohon kurma yang menjadi tempat berlindung kaum Anshar dan tokoh terpenting mereka. Wahai orang-orang Quraisy, hendaknya ada satu pemimpin yang harus berasal dari kami dan satu pemimpin dari kalian." Maka terjadilah kerusuhan gara-gara ucapannya tersebut, suara-suara semakin meninggi, dan 'Umar khawatir sekali terjadi konflik. 'Umar segera berkata: "Wahai Abu Bakar, ulurkan tanganmu." Abu Bakar lalu mengulurkan tangannya, kemudian 'Umar membaiainya diikuti kaum Muhajirin, dan kaum Anshar.

Kemudian mereka tinggalkan Sa'ad bin Ubadah, hingga ada yang berkomentar dari mereka tentangnya, "Kalian telah membinasakan Sa'ad," maka 'Umar sambut, "Allah-lah yang telah membinasakan Sa'ad." Kemudian 'Umar melanjutkan pidatonya dan berkata, "Demi Allah, kami tidak pernah menemui perkara yang paling besar dari perkara baiat terhadap Abu Bakar. Kami sangat takut jika kami tinggalkan mereka tanpa ada yang dibaiat, maka mereka kembali membuat baiat. Jika seperti

itu kondisinya kami harus memilih antara mematuhi baiat mereka padahal kami tidak merelakannya, atau menentang baiat yang mereka buat yang pasti akan menimbulkan kehancuran, maka barang siapa membaiait seorang amir tanpa musyawarah terlebih dahulu, baiatnya dianggap tidak sah. Dan tidak ada baiat terhadap orang yang mengangkat baiat terhadapnya, keduanya harus dibunuh.'" (Ibnu Katsir, 2004)

Peristiwa di Saqifah yang telah dibahas menjadi peristiwa yang menandai kelahiran *rasyidun* dengan kedudukan Abu Bakar menjadi seorang khalifah pertama bagi umat Islam yang dipilih secara demokratis berdasarkan kesepakatan mayoritas masyarakat yang ada di tempat tersebut. Penulis berpendapat, apabila melihat dari rangkaian kisah tersebut, sepertinya tidak semudah itu 'Umar melakukan baiat terhadap Abu Bakar. Terlebih pencalonan Ubaidah dan Abu Bakar bukan semata-mata pencalonan diri sendiri, melainkan atas pengajuan dua kubu berdasarkan kapabilitas mereka berdua yang dipandang masyarakat mampu

menggantikan posisi kepemimpinan setelah Nabi wafat. Bahkan Abu Bakar sebelumnya mencalonkan ‘Umar dan Abu Ubaidah, namun mayoritas justru terkesan dengan Abu Bakar.

Secara logis tentu ada sebuah musyawarah dan dialog panjang terlebih dahulu antara dua pihak, yaitu kubu yang mencalonkan Ubaidah dan kubu yang mencalonkan Abu Bakar, sampai akhirnya diambilah voting dengan kemenangan suara terbanyak Abu Bakar. Selain itu, terlepas dari etis tidaknya Abu Bakar dan ‘Umar menuju ke saqifah sementara keluarga Nabi sedang berkabung, merupakan salah satu insting politik yang tepat, guna mencegah timbulnya masalah yang lebih besar lagi yaitu perpecahan umat tanpa harus saling menghunuskan pedang terhadap sesama muslim. Pemaparan mengenai sejarah ini tentunya harus disampaikan secara edukatif kepada pelajar agar dipahami sebagai sebuah ilmu pengetahuan bukan sekedar sebagai kisah semata.

3. Implikasi Peristiwa Saqifah dan Model Kepemimpinan masa Khulafa’ Ar-Rasyidin

Peristiwa di Saqifah Bani Saidah, yang menghasilkan kesepakatan pengangkatan Abu Bakar, menjadi salah satu pintu gerbang perkembangan politik dalam Islam. Nabi Muhammad SAW. sebagai pemimpin agama dan negara Islam pertama di Madinah tentunya telah memberikan banyak contoh kepada para sahabat bagaimana berpolitik yang baik dan benar. Perjanjian Aqabah I, Aqabah II, serta Piagam Madinah, menjadi sebuah produk hukum yang sangat baik pada masa itu, dan menjadi bukti bahwa Nabi benar-benar telah meletakkan Islam bukan hanya sebagai jalan beragama, namun juga sebagai pedoman bermasyarakat dan dasar negara. Berbagai kebijakan dan sistem politik yang dibangun pada masa *Khulafa’ ar-Rasyidin* pun akan selalu berpedoman pada apa yang telah dicontohkan Nabi, selain juga memiliki ciri khas masing-masing dari tiap pemimpin.

a. Abu Bakar

Masa kekhalifahan Abu Bakar berlangsung selama 2 tahun, 11-13 H (632-634 M), diawali dengan pidato yang memberi komitmen bahwa dirinya diangkat menjadi pemimpin Islam sebagai khalifah Rasulullah, yaitu menggantikan Rasulullah melanjutkan tugas-tugas kepemimpinan agama dan pemerintahan. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, pada satu sisi memberikan keuntungan tersendiri bagi berlanjutan pemerintahan negara Madinah, namun pada sisi lain munculnya penolakan orang-orang arab, terutama orang-orang yang baru masuk Islam. Penentangan terhadap negara Madinah yang dilakukan oleh suku-suku arab merupakan sebuah realitas bangsa arab sangat sulit menerima kebenaran, sangat sulit untuk tunduk pada ajaran yang baru, yang tidak umum berkembang pada lingkungan mereka. (Katimin, 2017)

Munculnya gerakan murtad, golongan orang-orang yang menolak membayar zakat, dan pengangkatan nabi palsu Musailamah al-Kadzab, mendorong Abu Bakar melakukan konsolidasi terhadap bangsa-bangsa

Arab untuk bersatu mempertahankan Islam serta menunjuk Khalid bin Walid untuk menjadi komandan dalam upaya penumpasan gerakan murtad. Abu Bakar wafat dalam usia 62 tahun, pada 2 Jumadil Akhir 13H, setelah menderita sakit selama 15 hari. (Katimin, 2017)

b. ‘Umar bin Khattab

Pemilihan ‘Umar bin Khattab sebagai khalifah dilakukan dengan cara agak berbeda. Ia diusulkan oleh Abu Bakar mengingat kemampuan yang dimilikinya. Meskipun demikian, tidak serta merta Abu Bakar melakukan penunjukan. Proses itu terjadi ketika Abu Bakar sakit, dimana sebelum wafat, dia memanggil sahabat senior untuk konsultasi dan diminta pendapat siapa yang paling tepat untuk menggantikannya sebagai khalifah. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar karena ketakutan dia akan timbul perpecahan di antara umat Islam. Maka Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat senior seperti Utsman Bin Affan, Abdurrahman Bin Auf, dari kaum Muhajirin dan As’ad Bin Khudair dari Anshar. (Katimin, 2017)

Keinginan Abu Bakar menjadikan ‘Umar sebagai penggantinya adalah sebuah keputusan yang bebas dari intervensi dan kepentingan politik pribadi. Abu Bakar tidak memiliki hubungan kerabat dengan ‘Umar apalagi hubungan bisnis. Apa yang dilakukannya adalah sebuah pilihan berdasarkan kualitas dan kapabilitas ‘Umar sebagai pemimpin umat. Khalifah ‘Umar menjabat sebagai khalifah selama 10 Tahun, dari tahun 13-23 H (634-644 M). Masa pemerintahan ‘Umar melakukan beberapa langkah politik. Langkah politik ekspansi merupakan langkah yang paling populer selama pemerintahan ‘Umar. Langkah ini dilakukan karena pasukan Islam sudah menyebar ke beberapa wilayah yang dikirim oleh pemerintahan Abu Bakar, mau tidak mau dia harus meneruskan langkah tersebut. (Katimin, 2017)

Meskipun melakukan penaklukan ke beberapa wilayah, ‘Umar tetap berpegang pada aturan tidak ada paksaan bagi warga pribumi untuk masuk Islam. Setelah wilayah Islam semakin meluas, atas dasar itu

mulailah dibangun lembaga-lembaga dan dewan-dewan yang mengurus berbagai kegiatan administrasi kenegaraan seperti perbendaharaan negara, pengadilan, perpajakan, kepolisian, dsb. Selanjutnya membuat aturan-aturan yang membahas gaji guru, tentara, dan pemungutan pajak. ‘Umar juga meletakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahannya dengan jalan membangun jaringan pemerintahan sipil. Juga bersifat egaliter dengan menjamin persamaan hak dalam bernegara, tidak membedakan atasan dan bawahan, penguasa dan rakyat. Ia meninggal pada bulan Dzulhijjah 23 H/644 M disebabkan oleh luka yang diderita akibat tikaman yang dilakukan Abu Lu’lu’ah, orang Persia yang mendendam karena penaklukan yang dilakukan pasukan Islam pada masa kepemimpinan ‘Umar. (Syalabi, 1979)

c. Utsman bin Affan

Naiknya Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga melalui proses yang lain lagi. Utsman bin Affan dipilih oleh sekelompok sahabat yang nama-namanya telah

ditentukan oleh Umar bin al-Khattab sebelum wafat, antara lain Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqash, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Abdullah bin Umar (putra 'Umar) juga diikutsertakan dengan ketentuan memiliki hak memilih namun tanpa hak untuk dipilih. Dasar pertimbangan Umar bin al-Khattab menunjuk enam orang sahabat ini adalah karena keenam orang ini dinyatakan oleh Nabi sebagai calon-calon penghuni surga, bukan mewakili kelompok atau suku. Keenam orang ini bermusyawarah untuk menentukan siapa yang paling pantas di antara mereka untuk menggantikan Umar. Dari proses tersebut berakhir dengan terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Ketika Utsman dibaiat menjadi khalifah, ia berusia 70 tahun. (Katimin, 2017)

Mengenai kebijakan yang diterapkan, Utsman pada dasarnya masih melanjutkan apa yang dilakukan pendahulunya, yaitu mengadakan perluasan wilayah. Pada awal pemerintahan, Pemerintahan Khalifah Utsman masih dapat

dikatakan demokratis, karena khalifah tidak pernah menunjukkan sikap represif. Namun seiring berjalannya waktu, karena Utsman semakin menua, perilaku bawahannya sulit terawasi. Salah satu hal yang menjadi sorotan dan dituding menjadi wujud kemerosotan demokrasi dalam masa pemerintahan Utsman adalah adanya perilaku nepotisme yang menempatkan Bani Umayyah pada posisi-posisi penting. (Ahmad Amin, 1987)

Akibatnya muncul kekecewaan dan gejolak politik di berbagai daerah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menentang khalifah untuk melakukan propaganda, salah satunya Abdullah bin Saba'. Puncaknya ketika para pembangkang dari berbagai daerah tersebut menyerbu rumah Utsman dan berhasil membunuhnya. Utsman wafat setelah memimpin selama 12 tahun. Peristiwa ini dalam sejarah Islam dikenal dengan *Al-Fitnah al-Kubra*. Pembunuhan terhadap Utsman ini merupakan tragedi politik kedua dalam Islam, setelah terbunuhnya 'Umar. Perbedaannya, 'Umar terbunuh karena dendam

kesukuan, sedangkan Utsman dibunuh oleh para pemberontak yang tidak puas dengan kebijakan-kebijakannya.

d. Ali bin Abi Thalib

Pemilihan Ali bin Abi Thalib juga berbeda dari khalifah sebelumnya. Ia dipilih dan dibaiat oleh kaum pemberontak yang menggulingkan Utsman karena tuduhan melakukan nepotisme dalam pemerintahan. Meski terkesan melakukan *coup d'état*, kaum pemberontak yang membaiat Ali juga melakukan musyawarah dengan penduduk Madinah perihal pengangkatan Ali sebagai khalifah. Hanya saja, dalam proses baiat Ali ini tidak tampak sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Faktor ketiadaan dukungan dari sahabat-sahabat senior inilah yang menyebabkan Ali pada awalnya menolak permintaan kaum pemberontak untuk menjadi khalifah. Namun karena desakan yang demikian kuat dari kaum pemberontak yang ketika itu memang menguasai Madinah, Ali pun menerima baiat mereka. Dari sini bisa dilihat bahwa pada dasarnya Ali

masih menghargai pendapat para sahabat utama. (Katimin, 2017)

Terjadi perkembangan yang berbeda dalam kasus naiknya Abu Bakar dan Utsman dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau pada dua orang sahabat yang disebut pertama, sekalipun semula hanya dipilih oleh beberapa orang saja, tetapi pada tahap selanjutnya diakui dan diterima oleh umat secara keseluruhan. Penetapan Ali sebagai khalifah, ternyata berakhiran lain. Ali hanya diterima dan diakui oleh sebagian saja dari umat Islam. Ada kelompok lain yang tidak mengakuinya, yaitu Muawiyah bin Abi Sofyan, gubernur Suria yang juga keluarga Utsman. Alasan penolakannya adalah: (1) Ali harus mempertanggungjawabkan terbunuhnya Utsman; (2) karena semakin luasnya wilayah kekuasaan politik Islam, maka yang berhak menentukan jabatan khalifah tidak semata hak orang Madinah saja. Pendapat ini mendapat dukungan sejumlah sahabat dan kemudian bergabung di Suria. Inilah pangkal tolak yang akan memberikan warna politik Islam selanjutnya. (Syamruddin Nasution, 2013)

Gejolak politik yang sebelumnya muncul di masa Utsman semakin nampak pada pemerintahan Ali, yaitu terjadinya perang Jamal dimana para penentang Ali menuntut pembunuh Utsman agar segera dihukum. Sebenarnya Ali sudah mencoba mengambil langkah damai dengan jalur kompromi dalam menghadapi persoalan tersebut, namun situasi dan kondisi yang tidak kondusif menyebabkan peperangan tidak dapat terelakkan. Kemudian puncaknya muncul pertempuran di Siffin antara tentara Ali dan Muawiyah bin Abi Sofyan yang berakhir dengan *Tahkim*. Peristiwa ini melahirkan tiga kubu dalam tubuh umat Islam: (1) kelompok yang setia kepada Ali bin Abi Thalib, yang kemudian dikenal dengan nama Syi'ah, (2) kelompok khawarij (keluar dari keputusan Ali), dan (3) kelompok yang setia kepada Muawiyah bin Abi Sofyan. Pertentangan segi tiga ini berlanjut dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib pada tahun kelima kekhalifahannya oleh Bin Muljam, seorang pengikut khawarij. (Syamruddin Nasution, 2013)

Wafatnya Ali bin Abi Thalib dan diangkatnya Muawiyah menjadi khalifah menandai berakhirnya periode pemerintahan *Kulafa' ar-Rasyidin*. Menganalisa dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa model pemerintahan pada masa *Khulafa' ar-Rasyidin* cenderung pada model republik. Hal ini disebabkan pemerintahan mereka, terutama dalam proses pergantian kepala negara tidak bersifat turun-temurun dalam satu garis keluarga, mulai penunjukan Abu Bakar as-Shiddiq sampai pengangkatan Ali bin Abi Thalib tidak terdapat kesamaan pola. Masing-masing dengan polanya sendiri.

Abu Bakar as-Shiddiq dengan model pilihan melalui suatu forum kecil, tetapi akhirnya diakui dan disepakati oleh umat Islam. Meskipun Umar bin Khattab naik sebagai khalifah karena wasiat dari Abu Bakar, akan tetapi Abu Bakar sudah menyiapkan tim formatur sebelumnya, selanjutnya diakui dan disepakati oleh umat. Utsman bin Affan dipilih oleh sekelompok sahabat utama yang ditentukan

sebelumnya oleh Umar bin Khattab, juga kemudian diakui dan disepakati oleh umat secara keseluruhan. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, sekalipun sebelumnya telah diakui oleh sejumlah sahabat utama, tetapi belakangan tidak ada kebulatan suara untuk mendukung kekhalifahan Ali. Bahkan kemudian telah melahirkan polarisasi kepemimpinan di lingkungan umat Islam. Setelah Muawiyah menjadi khalifah, sistem pemerintahan di bawahnya barulah berubah menjadi politik monarki dinasti yang dikenal dengan dinasti Umayyah.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan mengenai Saqifah dan berbagai peristiwa tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Peristiwa di Saqifah Bani Saidah (sebuah balai pertemuan di Madinah) menjadi forum diskusi politik yang modern dimana hasilnya Abu Bakar terpilih secara demokratis berdasarkan kesepakatan

mayoritas masyarakat di tempat tersebut sehingga ia diangkat menjadi seorang khalifah bagi umat Islam menggantikan Nabi Muhammad SAW.

2. Model pemerintahan pada masa *Khulafa' ar-Rasyidin* cenderung pada model republik. Hal ini disebabkan pemerintahan mereka, terutama dalam proses pergantian kepala negara tidak bersifat turun-temurun dalam satu garis keluarga, mulai penunjukan Abu Bakar as-Shiddiq sampai pengangkatan Ali bin Abi Thalib tidak terdapat kesamaan pola.
3. Terlepas dari konflik yang ada, peristiwa di Saqifah Bani Saidah menghasilkan satu resolusi politik yang memiliki dampak luar biasa terhadap perkembangan politik dan sistem ketatanegaraan di tubuh Umat Islam. Dinamika demokrasi yang terdapat dalam peristiwa ini dapat dijadikan sebagai bahan edukasi kepada para pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abidin Zainal. 1977. *Ilmu Politik Islam I*, Jakarta : PT Bulan Bintang
- Amin, Ahmad. 1987. *Islam dari Masa ke Masa*, Bandung, Rosyada
- Artha, Arwan Tuti. 2007. *Kudeta Mei '98 Persegeruan Habibie-Prabowo*, Yogyakarta: Galangpress
- Calvert, Peter. 1993. *Proses Sukses Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Fachrurrozi, Moch. "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah, Dan Imarah" *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Hemilotic Studies*, 4, no. 12 (July, 2008)
- Fuad, Zakki. 2011. *Sejarah Peradaban Islam: Paradigma Teks, Refleksi, Filosofis*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel
- Haikal, Muhammad Husin. 1979. *Hayyah Muhammad*, Jakarta: Pustaka Jaya
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghaliya Indonesia
- Hashem. 1994. *Saqifah: Awal Perselisihan Umat*, Jakarta: Al-Muntazhar
- Hashem. 2004. *Wafat Rasulullah dan Sukses sepeeninggal beliau di Saqifah*, Bekasi: YAPI
- Hisyam, Ibnu. 2000. *As-Sirah An-Nabawiyah li Bin Hisyam* terj. Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah
- Iqbal, M Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Katimin. 2017. *Politik Islam: Study Tentang, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*, Medan: Perdana Publishing
- Katsir, Binu. 2004. *Al- Bidayah wa An-Nihayah* terj. Abu Ihsan, Jakarta: Darul Haq
- Rabi'ah, Rumidah. 2009. *Lebih Dekat dengan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Revitch, Diane dan Abigail Themstrom (eds.). 1997.

- Demokrasi: Klasik dan Modern*, terj. Hermoyo, Jakarta: Yayasan Obor
- Safiyurrahman. 2008. *Al-Rahiq al-Makhtum*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Salim, Abdul Mu'in. 2002. *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada
- Syadzali, Munawir. 1999. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press
- Syalabi, Ahmad. 1979. *Sejarah Kebudayaan Islam Jakarta* : Pustaka Al Husna
- Tim Penyusun kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Wibowo, Ragil Sapto. 2011. *Suksesi Kepemimpinan dalam Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Yasin, Rahman. 2006. *Gagasan Islam tentang Demokrasi*, Yogyakarta: AK Group